

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KOTA  
TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN  
TUGU KOTA SEMARANG**

Oleh :

Ika Nur Rachma, Nina Widowati

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang  
Telepon (024) 7465407**

**ABSTRAK**

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah. Adapun saran dari peneliti yaitu meningkatkan pembangunan jalan yang sempit, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta meningkatkan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo.

**Kata Kunci :** *implementasi, kebijakan, program, permukiman kumuh.*

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. (SE. DJCK No.110, 2016).

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019, dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh di tahun 2019. Salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal

air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. (kotaku.pu.go.id, 2016).

Dasar kebijakan program Kotaku adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019 pada gerakan 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi). Untuk memenuhi target 0% kawasan kumuh tersebut maka Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR membuat program Kotaku. Implementasi program Kotaku di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh, di mana dalam pelaksanaan lokasi sasaran program Kotaku sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh, penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan penanganan permukiman kumuh. Luas kumuh di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah sebesar 3.982,88 Ha.

Data Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah sesuai RPJMN 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET PENGURANGAN KUMUH JATENG (HA)
1.	CILACAP	20,84
2.	BANYUMAS	69,58
3.	PURBALINGGA	32,39
4.	BANJARNEGARA	58,22
5.	KEBUMEN	69,57
6.	PURWOREJO	82,69
7.	WONOSOBO	70,83
8.	MAGELANG	69,91
9.	BOYOLALI	0,36
10.	KLATEN	186,41
11.	SUKOHARJO	35,28
12.	WONOGIRI	24,47
13.	KARANGANYAR	68,28
14.	SRAGEN	2,33
15.	GROBOGAN	50,77
16.	BLORA	48,11
17.	REMBANG	59,53
18.	PATI	107,39
19.	KUDUS	95,06
20.	JEPARA	49,26
21.	DEMAK	38,15
22.	SEMARANG	179,04
23.	TEMANGGUNG	8,34
24.	KENDAL	230,19
25.	BATANG	88,86
26.	PEKALONGAN	614,52
27.	PEMALANG	240,74
28.	TEGAL	50,00
29.	BREBES	27,94
30.	KOTA MAGELANG	65,55
31.	KOTA SURAKARTA	413,78
32.	KOTA SALATIGA	21,84
33.	KOTA SEMARANG	415,93
34.	KOTA PEKALONGAN	195,59
35.	KOTA TEGAL	191,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>3982,88</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh tertinggi se-Jawa Tengah dengan luasan kumuh sebesar ±415,83 Ha. Permasalahan kumuh di Kota Semarang ialah permukiman kumuh di

pesisir, pusat dan pinggiran kota dengan tingkat kumuh ringan hingga berat. Permasalahan utama permukiman kumuh adalah jalan, drainase, air bersih dan sanitasi yang disebabkan karena masyarakat belum memiliki kesadaran

untuk memelihara lingkungannya. Kawasan pesisir sering banjir, akibat rob air laut. Selain itu, terjadi penurunan tanah di kawasan pesisir. Luas kawasan kumuh

kota Semarang 415,83 Ha tersebar di 62 kelurahan. (SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014)

#### Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang

NO	LOKASI		LUAS (Ha)
	KECAMATAN	KELURAHAN	
1.	TUGU	Mangunharjo	1,56
		Mangkang Kulon	3,79
		Mangkang Wetan	13,59
2.	GENUK	Genuksari	6,19
		Banjardowo	3,38
		Terboyo Kulon	0,62
		Trimulyo	6,00
3.	SEMARANG BARAT	Tambakharjo	2,67
		Ngemplak Simongan	1,32
		Krobokan	16,16
4.	SEMARANG TENGAH	Brumbungan	2,68
		Bangunharjo	4,00
		Kembangsari	5,00
		Jagalan	1,36
		Miroto	7,00
		Kauman	2,00
		Pekunden	5,00
		Sekayu	2,32
5.	SEMARANG TIMUR	Bugangan	8,34
		Rejosari	1,30
		Mlatiharjo	11,52
		Mlatibaru	3,93
		Rejomulyo	8,43
		Kemijen	15,86
6.	SEMARANG UTARA	Tanjung Mas	37,63
		Bandarharjo	33,44
		Panggung Kidul	26,00
		Kuningan	23,09
		Dadapsari	27,24
7.	CANDISARI	Jomblang	1,10
		Karanganyar Gunung	1,67
8.	PEDURUNGAN	Gemah	5,50
		Muktiharjo Kidul	13,76
		Penggaron Kidul	2,19
9.	SEMARANG SELATAN	Lamper Lor	4,71
		Lamper Kidul	1,53
		Peterongan	1,33
		Lamper Tengah	7,39
10.	TEMBALANG	Tandang	3,12
		Sendangguwo	4,36
		Rowosari	7,07
		Meteseh	10,42
11.	GAYAMSARI	Sawah Besar	6,14
		Kaligawe	7,35
		Tambakrejo	5,23
		Gayamsari	1,57
12.	MIJEN	Purwosari	3,45
		Jatibarang	0,86
13.	BANYUMANIK	Ngesrep	0,59
		Padangsari	0,49
		Jabungan	11,68
		Tinjomoyo	5,53

		Srdol Kulon	3,67
		Gedawang	5,54
14.	GUNUNGPATI	Patemon	0,14
		Sekaran	3,19
		Sadeng	2,47
		Sukorejo	2,60
		Nongkosawit	3,77
15.	NGALIYAN	Wonosari	3,12
		Kalipancur	1,32
		Purwoyoso	1,65
<b>Total</b>			<b>415,83</b>

Sumber : SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa di Kota Semarang terdapat 62 kelurahan pada 15 kecamatan yang terindikasi terdapat kawasan kumuh. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan dampak permasalahan yang lain.

Berdasarkan Studi Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh dan Profil Permukiman Kumuh dalam RP2KPKP Kota Semarang Tahun 2017, program pembangunan yang telah dilaksanakan di dalam kawasan permukiman tidak semuanya dapat berkontribusi terhadap pengurangan kumuh yang ada. Contoh saja di Kecamatan Tugu. Kecamatan Tugu memiliki tiga kelurahan yang tercatat dalam wilayah kumuh, antara lain di Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mangkang Kulon, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Ketiga kelurahan tersebut pada tahun 2014-2019 tidak mengalami prosentase pengurangan

kumuh. Berdasarkan jurnal Ary Prihantato, dkk yang berjudul Identifikasi Kondisi Kebencanaan di Kawasan Kepesisiran Kecamatan Tugu Kota Semarang, masalah utama kondisi kebencanaan di Kecamatan Tugu yaitu, erosi pantai, banjir sungai, genangan pasang, dan intrusi air laut. Sungai Beringin merupakan yang paling dominan kaitannya dengan banjir sungai, selain itu limbah air yang berasal dari daerah Mijen yang posisinya lebih tinggi yang mengakibatkan seringnya mengalami banjir di sekitar Tugu.

Kondisi kebencanaan di Kecamatan Tugu tersebut merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan adanya permukiman kumuh. Terlebih luas abrasi di Kota Semarang pada tahun 2019 mencapai 1.406 hektar. Kelurahan Mangunharjo di Kecamatan Tugu tercatat sebagai kelurahan terluas yang mengalami abrasi yakni seluas 248 hektar. (<https://semaranginside.com/waduh-luasan-abrasi-semarang-capai-1-406-hektare/>).

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Semarang Hasil Verifikasi

No (1)	Kecamatan (2)	Kelurahan (3)	Luas Kumuh Awal SK 2014 (Ha) (4)	Luas Kumuh Akhir 2017 (Ha) (5)	Prosentase Pengurangan Kumuh (6)
1.	Tugu	Mangunharjo	1,56	1,56	0%
2.	Tugu	Mangkang Kulon	3,79	3,79	0%
3.	Tugu	Mangkang Wetan	13,59	12,47	0%
4.	Genuk	Genuksari	6,19	4,75	23%
5.	Genuk	Banjardowo	3,38	3,38	0%
6.	Genuk	Terboyo Kulon	0,62	0,32	48%
7.	Genuk	Trimulyo	6,00	4,69	22%

8.	Semarang Barat	Tambakharjo	2,67	0,00	100%
9.	Semarang Barat	Ngemplak Simongan	1,32	0,00	100%
10.	Semarang Barat	Krobokan	16,16	2,64	84%
11.	Semarang Tengah	Brumbungan	2,68	2,24	16%
12.	Semarang Tengah	Bangunharjo	4,00	3,47	13%
13.	Semarang Tengah	Kembangsari	5,00	1,70	66%
14.	Semarang Tengah	Jagalan	1,36	1,36	0%
15.	Semarang Tengah	Miroto	7,00	3,53	50%
16.	Semarang Tengah	Kauman	2,00	2,00	0%
17.	Semarang Tengah	Pekunden	5,00	0,00	100%
18.	Semarang Tengah	Sekayu	2,32	0,00	100%
19.	Semarang Timur	Bugangan	8,34	3,11	63%
20.	Semarang Timur	Rejosari	1,30	0,00	100%
21.	Semarang Timur	Mlatiharjo	11,52	7,51	35%
22.	Semarang Timur	Mlatibaru	3,93	3,93	0%
23.	Semarang Timur	Rejomulyo	8,43	2,64	69%
24.	Semarang Timur	Kemijen	15,86	13,89	12%
25.	Semarang Utara	Tanjung Mas	37,63	31,08	17%
26.	Semarang Utara	Bandarharjo	33,44	28,08	16%
27.	Semarang Utara	Panggung Kidul	26,00	9,15	57%
28.	Semarang Utara	Kuningan	23,09	20,84	10%
29.	Semarang Utara	Dadapsari	27,24	26,20	4%
30.	Candisari	Jomblang	1,10	0,52	53%
31.	Candisari	Karanganyar Gunung	1,67	0,82	51%
32.	Pedurungan	Gemah	5,50	0,00	100%
33.	Pedurungan	Muktiharjo Kidul	13,76	12,61	8%
34.	Pedurungan	Penggaron Kidul	2,19	2,19	0%
35.	Semarang Selatan	Lamper Lor	4,71	3,75	20%
36.	Semarang Selatan	Lamper Kidul	1,53	1,53	0%
37.	Semarang Selatan	Peterongan	1,33	0,54	59%
38.	Semarang Selatan	Lamper Tengah	7,39	4,60	38%
39.	Tembalang	Tandang	3,12	0,88	72%
40.	Tembalang	Sendangguwo	4,36	3,81	0%

41.	Tembalang	Rowosari	7,07	2,71	62%
42.	Tembalang	Meteseh	10,42	10,42	0%
43.	Gayamsari	Sawah Besar	6,14	3,51	43%
44.	Gayamsari	Kaligawe	7,35	4,47	39%
45.	Gayamsari	Tambakrejo	5,23	5,23	0%
46.	Gayamsari	Gayamsari	1,57	0,00	100%
47.	Mijen	Purwosari	3,45	3,45	0%
48.	Mijen	Jatibarang	0,86	0,86	0%
49.	Banyumanik	Ngesrep	0,59	0,00	100%
50.	Banyumanik	Padangsari	0,49	0,49	0%
51.	Banyumanik	Jabungan	11,68	11,68	0%
52.	Banyumanik	Tinjomoyo	5,53	0,69	88%
53.	Banyumanik	Srondol Kulon	3,67	3,67	0%
54.	Banyumanik	Gedawang	5,54	1,67	70%
55.	Gunungpati	Patemon	0,14	0,00	100%
56.	Gunungpati	Sekaran	3,19	3,19	0%
57.	Gunungpati	Sadeng	2,47	2,47	0%
58.	Gunungpati	Sukorejo	2,60	0,00	100%
59.	Gunungpati	Nongkosawit	3,77	3,77	0%
60.	Ngaliyan	Wonosari	3,12	1,55	50%
61.	Ngaliyan	Kalipancur	1,32	0,00	100%
62.	Ngaliyan	Purwoyoso	1,65	0,55	67%
<b>Jumlah Total</b>			<b>415,93</b>	<b>285,96</b>	<b>31%</b>

Sumber: RP2KPKP Kota Semarang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa di Kecamatan Tugu pada tahun 2014-2019 tidak mengalami perubahan pada prosentase pengurangan kawasan kumuh yang terdapat di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mangkang Kulon, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Tiga kelurahan tersebut apabila dilihat dari letaknya memang berdampingan langsung dengan Laut Jawa.

Implementasi program Kotaku di Kecamatan Tugu dilaksanakan di dua kelurahan yaitu Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangunharjo. Kedua kelurahan tersebut masuk klasifikasi kawasan kumuh ringan, di mana kawasan kumuh tersebut dapat disebabkan karena permukiman kumuh terletak di dataran rendah, selain itu kedua kelurahan tersebut posisinya ada pada tepi air, serta wilayah tersebut rawan bencana yaitu rob dan banjir.

Pernyataan sekretaris camat terkait pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan Tugu sebagai berikut :

“Iya benar program Kotaku yang ada di Kecamatan Tugu ada Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo. Untuk pelaksanaan di Kelurahan Mangkang Kulon kebetulan sudah selesai pada tahun 2018, sedangkan pelaksanaan di Kelurahan Mangunharjo baru dilaksanakan pada tahun 2019.” (Jumat, 1 November 2019).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Mangunharjo :

“Iya, mba, benar. Kelurahan Mangunharjo mendapat program Kotaku yang tepatnya berada di RW 05 Tanggulsari, yang mana pelaksanaan program pada tahun ini 2019 kira-kira mulai pada bulan Juli dengan luasan kumuh sekitar 1,56 Ha.” (Senin, 5 November 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangkang Kulon sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019

pelaksanaan program Kotaku terdapat di

Kelurahan Mangunharjo.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu?

hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan tersebut dapat berbentuk sebagai program guna mencapai tujuan tertentu yang menyangkut tugas pemerintahan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2016: 532) merumuskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan/instansi pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana yang dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dari pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan. (Kismartini, 2005:8)

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan (Suharno, 2013: 173). Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Mazmanian dan



Sabatier dalam Suharno (2013: 173-176) dijelaskan sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah  
Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut:
  - a. Tingkat kesulitan teknis masalah yang bersangkutan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik Kebijakan  
Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal, yaitu:
  - a. Kejelasan isi kebijakan.
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
  - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel Lingkungan  
Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi beberapa faktor, yaitu:
  - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
  - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).

Berdasarkan penjelasan model implementasi kebijakan tersebut, dalam

penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang karena pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat namun pemerintah daerah sebagai pelaksana serta terdapat partisipasi dari masyarakat sehingga menggunakan teori tersebut agar tujuan penelitian dapat terpenuhi. Selain itu, adanya karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

### III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh. Lokus penelitian ini yaitu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan

##### 4.1.1 Karakteristik Masalah dalam Tahap Persiapan Program Kotaku

Karakteristik masalah dalam tahap persiapan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo dapat dilihat melalui tingkat kemajemukan kelompok sasaran dan proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi yang ada. Hasil penelitian yang telah dilakukan di

lapangan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Mangunharjo, khususnya di RW 05 bermatapencarian nelayan yang berpenghasilan rata-rata rendah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pada dasarnya masyarakat Kelurahan Mangunharjo khususnya RW 05 menerima adanya program Kotaku karena program Kotaku dapat membangun wilayah mereka yang awalnya kumuh dapat menjadi tidak kumuh.

Apabila dilihat melalui tingkat kemajemukan kelompok sasaran, masyarakat Kelurahan Mangunharjo, khususnya di RW 05 bersifat relatif homogen, yaitu sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai nelayan yang melaut di malam hari dan mendarat di pagi hari. Masyarakat RW 05 Kelurahan Mangunharjo yang bersifat relatif homogen itu akan relatif mudah untuk dilakukannya implementasi program dan masyarakat menerima adanya program Kotaku, terlebih program Kotaku dapat membuat wilayah mereka yang sebelumnya kumuh menjadi tidak kumuh.

Terkait proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi, sebaliknya sebuah program akan relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Perihal implementasi program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo tidak dilaksanakan di semua wilayah, melainkan sasaran program hanya di satu RW yaitu RW 05. Oleh karena itu, pada tahap persiapan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo relatif mudah diimplementasikan, karena hanya menyangkut satu RW dan karakteristik masyarakatnya yang bersifat homogen.

#### 4.1.2 Karakteristik Kebijakan dalam Tahap Persiapan Program Kotaku

Karakteristik kebijakan dalam tahap persiapan program Kotaku di

Kelurahan Mangunharjo dapat dilihat melalui kejelasan isi kebijakan, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada, serta tingkat komitmen para pelaksana program. Terkait kejelasan isi kebijakan serta kejelasan dan konsistensi aturan yang ada, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan kejelasan isi kebijakan telah disampaikan dalam sosialisasi yang dilakukan Korkot melalui faskel kepada BKM dan masyarakat Kelurahan Mangunharjo. Terdapat dua kegiatan yaitu sosialisasi dan rebug kesiapan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Korkot melalui faskel bersangkutan dengan pemberitahuan informasi kepada masyarakat yang diwakilkan oleh RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat terkait wilayah yang menjadi sasaran program dan pendanaan untuk mengatasi kekumuhan. Setelah informasi tersebut telah disampaikan, akan diadakan rebug kesiapan masyarakat terkait rencana untuk menangani kumuh tersebut hingga mencapai kesepakatan bersama.

Terkait komitmen para pelaksana program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo pada tahap persiapan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksana program Kotaku, mulai dari Korkot Program Kotaku Kota Semarang melalui fasilitator hingga BKM Mangunharjo, sudah menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang dijalankan sesuai dengan petunjuk operasional standar yang telah ditetapkan.

#### 4.1.3 Variabel Lingkungan dalam Tahap Persiapan Program Kotaku

Karakteristik kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Mangunharjo sebagian besar masyarakat Kelurahan Mangunharjo, khususnya di RW 05 bermatapencarian nelayan yang berpenghasilan rata-rata rendah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pada dasarnya masyarakat Kelurahan Mangunharjo khususnya RW 05 menerima

adanya program Kotaku karena program Kotaku dapat membangun wilayah mereka yang awalnya kumuh dapat menjadi tidak kumuh. Selain dampak fisik yang terlihat, adanya program Kotaku juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pembangunan.

## 4.2 Perencanaan

### 4.2.1 Karakteristik Masalah dalam Tahap Perencanaan Program Kotaku

Menurut Mazmanian dan Sabatier, karakteristik masalah (*tractability of the problem*) meliputi beberapa faktor yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Faktor karakteristik masalah yang diamati dalam penelitian ini yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu.

Kesulitan teknis pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo juga tidak terlihat kendala suatu apapun, karena pada tahap perencanaan program sudah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Kumuh, serta adanya dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Korkot melalui faskel terhadap BKM dan KSM Kelurahan Mangunharjo.

Karakteristik perubahan perilaku oleh masyarakat Kelurahan Mangunharjo dalam tahap perencanaan program Kotaku cukup terlihat mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan yang sebelumnya sebagian masyarakat pada setiap harinya hanya melaut atau melakukan aktivitas

sehari-hari seperti biasanya, dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo membuat masyarakat turut aktif dan bekerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan ini. Tidak hanya melaut atau melakukan aktivitas biasanya, namun masyarakat juga ikut membangun wilayah mereka juga bahkan sebagian dari masyarakat ini dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo ini dapat membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar dalam proses pembangunan.

### 4.2.2 Karakteristik Kebijakan dalam Tahap Perencanaan Program Kotaku

Menurut Mazmanian dan Sabatier, salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan ialah karakteristik kebijakan. Karakteristik kebijakan dapat meliputi seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis serta seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Tahap perencanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo memiliki dukungan teoritis yang berupa regulasi/aturan yang mengikat dalam pelaksanaannya, salah satunya Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Terkait keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana dapat terlihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Korkot melalui faskel terhadap BKM dan KSM Kelurahan Mangunharjo. Selain itu keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana dapat dilihat ketika penyusunan rencana program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, yang meliputi penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan dan Permukiman) dan penyiapan KSM. Setelah itu diadakannya penyusunan rencana detil/teknis pelaksanaan program yang meliputi rembug-rembug lanjutannya yaitu menyusun perencanaan sesuai anggaran, penyusunan dokumen teknis

BPM, serta musyawarah persiapan pekerjaan yang semua pelaksanaannya didampingi faskel setelah disetujui oleh pihak kota, dalam hal ini yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman.

#### 4.2.3 Variabel Lingkungan dalam Tahap Perencanaan Program Kotaku

Menurut Mazmanian dan Sabatier, variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) meliputi beberapa faktor yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajemukan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, dan sikap dari kelompok pemilih (*contituency grups*). Faktor variabel lingkungan yang diamati dalam penelitian ini yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dukungan publik terhadap sebuah kebijakan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu.

Karakteristik perubahan perilaku oleh masyarakat Kelurahan Mangunharjo dalam tahap perencanaan program Kotaku cukup terlihat mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan yang sebelumnya sebagian masyarakat pada setiap harinya hanya melaut atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo membuat masyarakat turut aktif dan bekerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan ini. Tidak hanya melaut atau melakukan aktivitas biasanya, namun masyarakat juga ikut membangun wilayah mereka juga bahkan sebagian dari masyarakat ini dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo ini dapat membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar dalam proses pembangunan.

Terkait karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Mangunharjo yang sebagian besar nelayan menjadi tantangan bagi Korkot, pihak kelurahan, serta BKM Kelurahan Mangunharjo dalam menyampaikan

program Kotaku kepada masyarakat. Masyarakat yang biasanya hanya melaut dengan adanya program Kotaku ini diajak kerja sama untuk bersama-sama turut aktif dalam program pembangunan ini.

#### 4.3 Pelaksanaan

##### 4.3.1 Karakteristik Masalah dalam Tahap Pelaksanaan Program Kotaku

Karakteristik masalah pada tahap pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo ketika penyusunan kontrak dengan pihak terkait. Terkait penyusunan kontrak dengan pihak terkait pada awalnya tidak menemui kendala namun kendala ditemukan ketika pengangkutan bahan material dari toko material ke tempat sasaran pembangunan karena kesulitan akses jalan yang sempit oleh kendaraan roda empat. Hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo karena kesulitan akses masuk material karena jalannya kecil sehingga material hanya diletakkan di jalan besar, untuk masuk ke perkampungan harus menggunakan gerobak dorong sehingga itu memerlukan tenaga tambahan lagi. Walaupun truk material tidak bisa masuk ke tempat pembangunan, BKM dan KSM Kelurahan Mangunharjo dapat mengatasi kendala tersebut dengan cara menggunakan gerobak dorong untuk mengangkut material hingga sampai ke tempat pembangunan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, terdapat kendala lain dalam kendala teknis ketika pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo yaitu adanya kekurangan sumber daya manusia ketika pelaksanaan pembangunan dilaksanakan bersamaan. Misalnya saja ketika talud dan pavingisasi dilakukan bersamaan. Hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, maka dari itu harus terdapat pembagian jumlah tenaga kerja sehingga

peran BKM dan KSM Kelurahan Mangunharjo menambah jumlah tenaga kerja agar dapat berjalan sesuai target. Terkait sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang diberikan Korkot melalui faskel ditemukan adanya kesulitan teknis, yaitu pelatihan sertifikasi yang hanya menampung kuota lima orang saja, padahal jumlah tukang di lapangan lebih dari itu.

#### 4.3.2 Karakteristik Kebijakan dalam Tahap Pelaksanaan Program Kotaku

Keberhasilan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo dalam teori Mazmanian dan Sabatier, terkait penganggaran dapat dilihat melalui variabel karakteristik kebijakan yakni besarnya alokasi sumber daya finansial. Terkait penganggaran, BKM harus menyusun dokumen pencairan terlebih dahulu, setelah siap dana akan disalurkan dari pusat melalui BKM setelah itu ke KSM sebagai pelaksana kegiatan. Terkait pencairan dana tersebut, tidak dilakukan secara tunai, namun melalui transfer langsung kepada pihak-pihak terkait. Perihal pencairan dana kepada BKM tersebut dapat dilakukan dua tahap, di Kelurahan Mangunharjo itu sendiri mendapatkan dana sebesar satu miliar rupiah dan dicairkan pada dua tahap. Tahap pertama sebesar 70% cair, setelah proses pencairan tersebut terdapat progress fisik dan apabila sudah memenuhi syarat pencairan, maka dapat dilakukan pencairan tahap keduanya. Apabila dilihat berdasarkan karakteristik kebijakan yaitu besarnya alokasi sumber daya finansial, pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo tidak mengalami kendala finansial karena Kelurahan Mangunharjo mendapatkan dana satu miliar dan itu dicairkan sesuai dengan anggaran perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 4.3.3 Variabel Lingkungan dalam Tahap Pelaksanaan Program Kotaku

Faktor variabel lingkungan yang diamati dalam penelitian ini yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dukungan publik terhadap sebuah kebijakan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu.

Terdapat perubahan pada karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Mangunharjo pada tahap pelaksanaan program. Adanya pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo khususnya di RW 05 membuat wilayah yang sebelumnya dapat dikatakan kumuh, sekarang sudah tidak kumuh lagi. Masyarakat juga menyambut baik adanya program ini karena wilayah yang mereka tinggali menjadi lebih bagus. Selain itu, adanya pelaksanaan pembangunan juga dapat menambah lapangan pekerjaan masyarakat di sekitarnya.

Dukungan masyarakat Kelurahan Mangunharjo terhadap program Kotaku mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan sangat mendukung adanya program Kotaku di wilayah mereka. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, masyarakat sangat mendukung adanya pelaksanaan program Kotaku khususnya di RW 05 Kelurahan Mangunharjo. Masyarakat dan BKM Mangunharjo menyambut dan merespon baik adanya program Kotaku ini. Hal tersebut dapat dilihat ketika pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, masyarakat ikut berperan aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di RW 05.

## 4.4 Keberlanjutan

### 4.4.1 Karakteristik Masalah dalam Tahap Keberlanjutan Program Kotaku

Karakteristik masalah pada tahap keberlanjutan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo dapat dilihat melalui cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Karakteristik perubahan perilaku oleh masyarakat Kelurahan Mangunharjo juga nampak terlihat dalam tahap keberlanjutan program. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo dapat memberikan dampak perubahan yang positif, yaitu berkurangnya wilayah kumuh di RW 05. Selain itu, adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang baru membuat perubahan perilaku yang ada pada masyarakat di Kelurahan Mangunharjo khususnya RW 05 yaitu masyarakat turut memelihara RTH dari kerusakan. Apabila terdapat kerusakan pada RTH tersebut, masyarakat dapat turut memperbaikinya bila terdapat kas RT atau RW.

Namun karakteristik perubahan perilaku masyarakat Kelurahan Mangunharjo tidak mengalami perubahan terkait permasalahan sampah. Berdasarkan hasil penelitian lain yang telah didapat penulis tentang pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo terkait cakupan perubahan perilaku yang diharapkan pada tahap keberlanjutan yaitu dengan adanya program Kotaku ini tidak merubah sifat masyarakat terkait pembuangan sampah rumah tangga. Permasalahan sampah hingga sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang cukup jauh dengan permukiman masyarakat mengakibatkan masyarakat masih meletakkan sampah-sampah mereka di sembarang tempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat dilihat bahwa dengan adanya program Kotaku di Kelurahan

Mangunharjo ini menunjukkan adanya perubahan perilaku positif dari masyarakat, yaitu masyarakat sadar akan ikut merawat dan memelihara hasil pembangunan dari program ini. Namun, masih terdapat kendala dalam faktor cakupan perubahan perilaku yang diharapkan yaitu masih adanya sikap acuh terhadap permasalahan sampah.

### 4.4.2 Karakteristik Kebijakan dalam Tahap Keberlanjutan Program Kotaku

Karakteristik kebijakan dalam tahap keberlanjutan program Kotaku dapat dilihat melalui seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Terkait monitoring program terdapat faskel yang dilakukan hampir di setiap minggu pelaksanaan pembangunan. Hal yang dievaluasi terkait pembangunan fisik dan evaluasi administrasi. Selain itu, terdapat berbagai pihak yang dapat ikut memonitoring program, mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga independen, hingga masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu karakteristik kebijakan yakni seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi.

### 4.4.3 Variabel Lingkungan dalam Tahap Keberlanjutan Program Kotaku

Menurut Mazmanian dan Sabatier, kebijakan yang mendapat dukungan dari publik akan lebih mudah diimplementasikan dari pada kebijakan yang ditolak oleh publik. Dukungan masyarakat Kelurahan Mangunharjo terhadap program Kotaku pada tahap keberlanjutan sangat mendukung adanya program Kotaku di wilayah mereka. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo, masyarakat sangat mendukung adanya pelaksanaan program Kotaku khususnya di RW 05

Kelurahan Mangunharjo. Masyarakat dan BKM Mangunharjo menyambut dan merespon baik adanya program Kotaku ini. Hal tersebut dapat dilihat ketika pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan

## V. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Implementasi program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Terlaksananya tahap persiapan yang dilakukan oleh Korkot melalui fasilitator kelurahan yang terdiri dari sosialisasi dan penggalangan komitmen para pemangku kepentingan di Kelurahan Mangunharjo didukung dengan tingkat kemajemukan penduduk yang bersifat homogen serta proporsi kelompok sasaran yang relatif sedikit sehingga program relatif mudah untuk diimplementasikan.
2. Terlaksananya tahap perencanaan yang mencakup persiapan perencanaan pembangunan yang terdiri dari rebug kesiapan masyarakat dan pelatihan-pelatihan yang diadakan Korkot melalui fasilitator kelurahan kepada masyarakat, penyusunan rencana program yang terdiri dari penyusunan RPLP dan penyiapan KSM, serta adanya penyusunan rencana detil/teknis didukung dengan adanya keterpautan dan dukungan antar pelaksana dengan adanya kerja sama para pelaksananya.
3. Terlaksananya tahap pelaksanaan program yang mencakup penganggaran, penyusunan kontrak dengan pihak-pihak terkait, hingga

Mangunharjo, masyarakat ikut berperan aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di RW 05.

sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan di Kelurahan Mangunharjo. Didukung dengan besarnya alokasi anggaran yang sesuai dengan dana yang diajukannya serta adanya pelatihan sertifikasi tukang. Namun, terkait pelatihan sertifikasi tukang hanya dapat menampung kuota 5 orang padahal jumlah tukang di lapangan lebih dari itu. Jadi, masih terdapat tukang yang belum mendapatkan pelatihan.

4. Terlaksananya tahap keberlanjutan program di Kelurahan Mangunharjo yang terdiri dari penguatan kelembagaan dan monitoring program. Terkait penguatan kelembagaan hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) di Kelurahan Mangunharjo serta adanya monitoring yang dilakukan oleh berbagai pihak. Adanya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo membuat perubahan perilaku masyarakat perihal pemeliharaan hasil pembangunan yang ada, namun tidak mengubah perilaku pemeliharaan sampah di sekitar permukiman.

#### 5.1.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Mangunharjo

Faktor pendorong dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo ini yaitu:

- a. Pada tahap persiapan, tingkat kemajemukan penduduk yang bersifat homogen dan proporsi kelompok sasaran relatif sedikit sehingga program relatif mudah untuk diimplementasikan, adanya

kejelasan isi kebijakan yang telah dijelaskan dalam sosialisasi dan rembuk warga., tingkat komitmen para pelaksana program yang cukup baik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar menerima program.

- b. Pada tahap perencanaan, kebijakan didukung dengan aturan yang ada dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh, serta adanya keterpautan dan dukungan antar pelaksana dengan adanya kerja sama para pelaksananya.
- c. Pada tahap pelaksanaan, adanya pelatihan sertifikasi tukang sehingga dapat mendorong kemajuan teknologi masyarakat sekitar, alokasi anggaran yang sesuai dengan jumlah yang telah diajukan, serta masyarakat berperan aktif ikut gotong royong dalam pelaksanaan program.
- d. Pada tahap keberlanjutan, adanya perubahan perilaku masyarakat untuk ikut sadar merawat dan memelihara hasil pembangunan program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo.

Faktor penghambat dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo yaitu:

- a. Adanya kesulitan akses masuk oleh truk yang mengangkut bahan material ke tempat sasaran dikarenakan jalan yang kecil.
- b. Ada kalanya kekurangan tukang apabila pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bersamaan.
- c. TPA yang letaknya cukup jauh dari permukiman masyarakat yang mengakibatkan masih terdapat permasalahan sampah yang belum terselesaikan.

## 5.2 Saran

5.2.1 Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, saran yang dapat penulis dalam meningkatkan kualitas berjalannya program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo ini, yaitu:

- a. Perlunya menambah kuota pelatihan sertifikasi yang dilakukan sesuai dengan jumlah tukang yang akan dipekerjakan, sehingga semua tukang yang bekerja sudah memiliki pembekalan yang baik dan tepat sesuai prosedur yang ada, dengan cara merekap semua data.

5.2.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program

Adapun saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan implementasi program Kotaku ini yaitu:

- a. Setelah program pembangunan ini selesai diharapkan dapat melanjutkan pembangunan terkait jalan yang sempit agar akses masuk untuk kendaraan roda empat dapat dilalui.
- b. Memperhitungkan jumlah tukang yang tersedia dengan beban kerja yang akan dijalankan.
- c. Meningkatkan komunikasi oleh pihak Kelurahan kepada masyarakat terkait program yang akan dijalankan di Kelurahan Mangunharjo sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas program apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Mangunharjo.
- d. Meningkatkan perbaikan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo dengan cara mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arawanda Nawagamuwa and nils Viking, 2003, *Slums Squatter Area and Informal Settlement*, 9<sup>th</sup> International Conference on Sri Lanka Studies.
- Keban, Yeremias T.. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media Buku.
- Kismartini, dkk.. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kurniasih, S., 2007. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh Di Petukangan Utara-Jakarta Selatan*. Universitas Budi Luhur.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### Jurnal :

- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105.
- Kumala, Sri dan Fitri Yusman. 2014. Kajian Karakteristik dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang). *Jurnal Teknik PWK: Vol. 3, No. 2*.
- Mahabir, Ron, dkk.. *The Study of Slums as Social and Physical Constructs: Challenges and Emerging Research Opportunities*. Jurnal

Internasional: Regional Studies  
Regional Science.

- Meisya, Alisa Rizky. 2015. *Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Kota Bandar Lampung (Analisis Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/Hk.010/B5/2009 Tentang Peningkatan Partisipasi Pria)*. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*.
- Nabila, S. F. (2018). Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Semarang Melalui Pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading and Shalter Project* (NUSP) Studi Kasus Kebonharjo RT. 02 RW. 05 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 171-180.
- Nursyahbani, Raisya dan Bitta Pigawati. 2015. *Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*. *Jurnal Teknik PWK: Vol. 4, No. 2*.
- Prihatanto, A., & Giyarsih, S. R. (2013). *Identifikasi Kondisi Kebencanaan di Kawasan Kepesisiran Kecamatan Tugu Kota Semarang*.
- Sinthia, S. Ahmed. *Sustainable Urban Development of Slum Prone Area of Dhaka City*. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:7, No:3*.
- Bardhan, R., Sarkar, S., Jana, A., & Velaga, N. R. (2015). *Mumbai slums since independence: Evaluating the policy outcomes*. *Habitat International*, 50, 1–11. doi:10.1016/j.habitatint.2015.07.009
- Muchadenyika, D., & Waiswa, J. (2018). *Policy, politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala Cities*. doi:10.1016/j.cities.2018.05.005
- Das, A. K., & Takahashi, L. M. (2009). *Evolving Institutional Arrangements, Scaling Up, and Sustainability*. *Journal of Planning Education and Research*, 29(2), 213–232.
- Zethary, R. E., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 224-238.

#### Dokumen :

Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Profil Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*.

Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Sekilas Informasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*.

Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. *Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri PUPR Nomor  
02/PRT/M/2016 tentang  
Peningkatan Kualitas terhadap  
Perumahan Kumuh dan  
Permukiman Kumuh

Studi Evaluasi Penanganan Permukiman  
Kumuh dan Profil Permukiman  
Kumuh DALAM RP2KPKP  
KOTA SEMARANG TAHUN  
2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011  
tentang Perumahan dan Kawasan  
Permukiman.

**Situs :**

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2017.  
*Tentang Program Kotaku.*  
<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>. Diakses pada 29 Mei 2019.

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan  
Mangunharjo  
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangunharjo>. Diakses pada 23 Januari 2020.

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan  
Mangkang Wetan.  
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangkang-wetan>. Diakses pada 23 Januari 2020

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan  
Mangkang Kulon.  
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangkang-kulon>. Diakses pada 23 Januari 2020.

Semarang Inside. 2019. Waduh, Luasan  
Abrasi Semarang Capai 1.406  
Hektare.  
<https://semaranginside.com/waduh-luasan-abrasi-semarang-capai-1-406-hektare/>. Diakses pada 23 Maret 2020.